

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses beracara pada gugatan yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pihak dalam persidangan diperlukan tim beracara;
- b. bahwa pelaksanaan tugas beracara dalam persidangan untuk bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan tugas tambahan Subbagian Hukum di luar dari tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEDUA : Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menangani dan menyelesaikan perkara dalam persidangan;
  - b. menghadap di muka Pengadilan;
  - c. menghadiri seluruh acara persidangan;
  - d. menghadap Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, Panitera dan pihak-pihak lain;
  - e. menerima dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan atau bersangkutan dengan perkara, memberikan keterangan/ penjelasan, mengadakan perdamaian;
  - f. membuat, menandatangani, mengesahkan dan mengajukan: eksepsi, segala permohonan, surat jawaban, gugatan rekonsvensi, duplik, replik rekonsvensi, bukti-bukti, kesimpulan, risalah banding dan memori/ kontra memori banding, risalah kasasi, memori/ kontra memori kasasi, segala rekes-rekes dan lain-lain surat yang diperlukan;
  - g. mengajukan saksi/ ahli, mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli, mengajukan dan mempelajari bukti-bukti;
  - h. menolak saksi/ ahli atau bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak lain;
  - i. menyatakan banding, menyatakan kasasi dan meminta perkara agar diperiksa kembali dengan peninjauan kembali;
  - j. mengambil segala tindakan jaminan, membuat dan menyuruh menjalankan segala perintah juru sita, pemberitahuan, panggilan-panggilan dan menghadiri pemberitahuan/ teguran-teguran dari Pengadilan-pengadilan dan lain-lain;
  - k. mengajukan atau mempertimbangkan usul penyelesaian perkara secara damai; dan
  - l. melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan berguna selaku Kuasa Hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepada pejabat/ pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan pelaksanaan persidangan dan/atau pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak berlakunya keputusan ini sampai dengan berakhirnya Tahun 2020.
- KEENAM : Nama-nama Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tim Beracara Dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

**ttd**

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM BERACARA DALAM  
PERSIDANGAN MEWAKILI  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 112

TANGGAL : 7 April 2020

NAMA TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN  
MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
1.	Setya Budi Arijanta S.H., KN NIP. 19701231 199503 1 001	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
2.	Sarah Sadiqa S.H., M.Sc. NIP. 19700118 199603 2 002	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3.	Dr. Salusra Widya, MA NIP. 19610509 198812 1 001	Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Kedeputian Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
4.	Dr. Robin Asad Suryo, MA NIP. 19650809 199003 1 001	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
5.	Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP NIP. 19610408 199403 1 002	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangguh	Kedeputusan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangguh
6.	Iwan Herniwan, S.Si., MP. NIP. 19691106 199803 1 006	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
7.	R.Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM NIP. 19660529 199201 1 001	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8.	Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc. NIP. 19640323 199203 1 005	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
9.	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Ak., MM. NIP. 19670410 198703 2 001	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Patria Susantosa, S.Si., M.Si. NIP. 19731201 200312 1 004	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
11.	Rinaldi Morintosh, S.H., M.kn. NIP. 19810509 201012 1 001	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
12.	Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H. NIP. 19841121 201012 2 001	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
13.	Muhammad Qadr Siddiq Zam, S.H. NIP. 19840621 201402 1 001	Kepala Seksi Pasca Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
14.	Inamawati Mastuti Dewi, S.H. NIP. 19900814 201402 2 001	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Barat	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
15.	Hilman Fazri, S.H. NIP. 19890312 201402 1 001	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
16.	Dian Arsita Wardhani, S.H. NIP. 19840823 201502 2 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
17.	Febri Kamalisa Rachman, S.H., M.H. NIP. 19840208 201502 2 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
18.	Rasmita Juliana Sitepu, S.H. NIP. 19880709 201502 2 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
19.	Ardian Hoppin Sitompul, S.H. NIP. 19880522 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
20.	Benny Leopold Dumais, S.H. NIP. 19890530 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
21.	Muhammad Hanif Firnanda, S.H. NIP. 19940703 201801 1 003	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
22.	Syukri, S.H. NIP. 19921124 201801 1 001	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional



No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
23.	Asih Riska Nurmasari, S.H. NIP. 19940725 201902 2 005	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
24.	Cherish Shery Desarya, M.H. NIP. 19881220 201902 2 002	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
25.	Mega Chandra Sera, S.H. NIP. 19940614 201902 2 002	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
26.	Carolina Maria Anggreini, S.H. NIP. 19930113 201902 2 002	Analisis Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
27.	Yogie Prastiyans, S.H. NIP. 19910706 201902 1 002	Analisis Berkas Sengketa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
28.	Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. NIP. 19690813 199703 1 001	Pelaksana	
29.	Sari Melani, S.H. NIP. 19800224 201012 2 001	Pelaksana	
30.	Mahatmya Widyasri, S.H.	Staf Pendukung Unit Kerja	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
31.	Faradita Utami Putri Sihite, S.H.	Staf Pendukung Unit Kerja	Kedeputian Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistemn Informasi
32.	Rayhan Maulana, S.H.	Staf Pendukung Unit Kerja	Kedeputian Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistemn Informasi

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
33.	Siti Fathia Rizki Sarkuti, S.H.	Staf Pendukung Unit Kerja	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
34.	Didi Nahtadi, S.Sy	Staf Pendukung Unit Kerja	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO